

*LAPORAN
RENCANA KERJA (RENJA) TRIWULAN IV
TAHUN 2024*



**DINAS PERTANIAN
KAB. PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam penyusunan Laporan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Triwulan IV Tahun 2024 Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Laporan Perubahan Renja Triwulan IV Tahun 2024 Dinas Pertanian ini merupakan laporan pertanggungjawaban Dinas terhadap pelaksanaan kinerja pembangunan pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Perubahan Renja Triwulan IV Tahun 2024 ini berisikan informasi tentang kinerja pembangunan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, penyuluhan pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner selama Triwulan IV Tahun 2024, kendala/ permasalahan yang ada dan upaya pemecahannya.

Demikian Laporan Perubahan Renja Triwulan IV Tahun 2024 Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun, Terima kasih.

Painan, 02 Januari 2025
Kepala Dinas,

MADRIANTO, S.Nut., M.H.
NIP. 19780519 200301 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Tujuan Evaluasi Perubahan Renja.....	5
BAB II EVALUASI PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024.....	6
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pada Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.	6
2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.....	8
BAB III PEMBAHASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERTANIAN DAN INDIKATOR KINERJA DAERAH.....	13
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.....	13
3.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD).....	16
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	21
4.1 Kesimpulan.....	21
4.2 Rekomendasi.....	22
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pada Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.....	7
Tabel 3.1	Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.....	15
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Makro Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.....	17
Tabel 3.3	Realisasi Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2022 - 2024.....	17
Tabel 3.4	Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB Sektor Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 - 2024.....	18
Tabel 3.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Sektor Pertanian.....	19
Tabel 3.6	Capaian Realisasi IKK Urusan Pemerintahan Sektor Pertanian.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin suatu program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi sebagai suatu rangkaian kegiatan manajemen pemerintah. Dasar penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) merupakan Amanat Undang-undang No 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2024.

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Hal pemantauan dan supervisi digunakan sebagai bahan evaluasi. Evaluasi adalah mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh perangkat daerah meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi Perubahan Renja tahun Anggaran 2024 didasarkan kepada pencapaian kinerja perangkat daerah sampai dengan tanggal 31 Maret 2024. Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappedalitbang. Kemudian Kepala Bappedalitbang melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kebijakan rencana dan pelaksanaan rencana pembangunan kepada Kepala Daerah, disertai dengan

rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan dan hasil evaluasi akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Renja tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 – 2026;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
 25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 187 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
 26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2024;
 27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
 28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
 29. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/154/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor :

900/719/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Tahun 2024; dan

30. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900.1.3/930/Distan/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900.1.3/01/DISTAN/2024 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

1.3 Tujuan Evaluasi Perubahan Renja

Tujuan evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja tahun 2024 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas, sebagaimana tercantum dalam Perubahan Renja tahun 2024, guna :

1. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renja tahun 2024 dan RPJMD tahun 2021 – 2026;
2. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan Perubahan Renja tahun 2024 serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Perubahan Renja tahun 2024.

BAB II

EVALUASI PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pada Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Rencana strategis (Renstra) adalah pedoman yang digunakan setiap lembaga/institusi untuk mencapai visi misi yang sudah ditetapkan. Renstra memuat tujuan, tata nilai, dan rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapainya. Rencana strategis yang disusun dengan baik dapat memainkan peran penting untuk mencapai tujuan, visi dan misi, karena ia memberi tahu semua pihak cara merespon peluang, tantangan, tujuan, dan sasaran yang realistis. Renstra berfungsi untuk memberikan panduan kerja, menentukan capaian dan strategi, Renstra merupakan living dokumen, yang dapat digunakan untuk dijadikan acuan apakah rencana yang sudah ditetapkan tercapai atau belum.

Untuk mengetahui capaian Renstra tersebut tercapai atau belum, maka perlu dilakukan evaluasi capaian renstra untuk mengukur keberhasilan tata kelola yang sudah dilakukan Lembaga, selanjutnya dilakukan perbaikan pengendalian dan pengembangan atau peningkatan. Evaluasi hasil pelaksanaan program pada Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pada Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Outlook 2021	Target Tahun ke					Realisasi Tahun ke			Ket
						2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN											
		3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
I	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berknerja	3.27.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE KETERCAPAIAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH (%)	91,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah			PERSENTASE KELENGKAPAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI KETEPATAN WAKTU PELAPORAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	-	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
				PERSENTASE KINERJA BIDANG YANG TERCAPAI (%)	-	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)
				JUMLAH INOVASI DINAS PERTANIAN (JENIS)	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
III	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	JUMLAH PRODUKSI PERTANIAN (TON)	468.149,00	503.846,00	514.094,00	524.579,00	535.308,00	546.287,00	503.846,00	487.867,00	487.867,00	
				PERSENTASE KELOMPOK TANI YANG MENERAPKAN SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) BUDIDAYA PERTANIAN (%)	50,75	52,88	53,14	53,49	53,61	53,72	47,21	31,28	19,30	
				PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN (KW/HA)	58,14	68,92	70,17	71,47	72,53	73,62	68,92	61,60	57,00	
				PERSENTASE TERNAK UNGGUL (%)	7,00	27,31	28,00	28,70	29,41	30,15	27,31	26,19	31,15	
		3.27.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	JUMLAH PRODUKSI PERTANIAN (TON)	468.149,00	503.846,00	514.094,00	524.579,00	535.308,00	546.287,00	503.846,00	487.867,00	487.867,00	
				JUMLAH INDEKS PERTANAMAN PER TAHUN (KALI)	1,30	1,62	1,70	1,79	1,88	2,00	1,62	1,63	1,78	
				PERSENTASE PENGELOLAAN WILAYAH SUMBER BIBIT DAN RUMPUN/GALUR TERNAK (%)	-	-	25,00	25,00	25,00	25,00	-	25,00	25,00	
				PERSENTASE PENGADUAA/ SARAN SEKTOR PERTANIAN YANG DITINDAKLANJUTI (%)	-	-	25,00	25,00	25,00	25,00	-	25,00	25,00	
		3.27.04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (KASUS)	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN PENYAKIT HEWAN/TERNAK (%)	2,32	3,87	4,28	4,47	4,68	4,91	2,77	-0,82	0,41	
				PERSENTASE PRODUK PANGAN HEWANI YANG AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL (ASUH) UNTUK DIKONSUMSI (%)	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		3.27.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (%)	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		3.27.06.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	JUMLAH UNIT USAHA YANG DIBERIKAN REKOMENDASI IZIN USAHA (UNIT)	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				PERSENTASE USAHA PERTANIAN YANG MEMILIKI IZIN USAHA (%)	29,60	30,27	32,00	34,00	37,00	40,00	30,27	32,00	-	
		3.27.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	JUMLAH KELOMPOK TANI YANG NAIK KELAS (KELOMPOK)	25,00	219,00	100,00	100,00	100,00	100,00	219,00	100,00	130,00	
				JUMLAH BALAI PENYULUHAN PERTANIAN YANG NAIK KELAS (UNIT)	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	

Sumber : Bagian Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran. Adapun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2024 Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan nilai Perubahan Renja tahun 2024 sebesar Rp.36.086.434.523,00 mendapatkan penugasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.104.880.696,00 dengan realisasi sampai triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp.30.071.425.143,00 atau sebesar 85,66% (Laporan Evaluasi Renja pada lampiran).

2.2.1 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Pertanian	A (89,53)
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	100
3	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	3,10 Triliyun

A. Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja

i. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 99,32%)

Yang meliputi kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Perubahan Renja, kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Perubahan Renja serta kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Perubahan Renja dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan

program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program ini bertujuan mendukung tercapainya kelengkapan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi, ketepatan waktu pelaporan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi, persentase kinerja bidang yang tercapai dan jumlah inovasi Dinas Pertanian. Nilai Perubahan Renja tahun 2024 sebesar Rp.19.505.896.020,00 dengan nilai pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp.19.497.059.647,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV Rp.17.050.876.320,00 atau sebesar 87,45%.

B. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah, dengan indikator kinerja yaitu:

ii. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 90%).

Yang meliputi kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Perubahan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Perubahan Renja serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Perubahan Renja dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program ini bertujuan mendukung tercapainya kelengkapan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi, ketepatan waktu pelaporan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi, persentase kinerja bidang yang tercapai dan jumlah inovasi Dinas Pertanian. Nilai Perubahan Renja tahun 2024 sebesar Rp.60.571.082,00 dengan nilai pagu anggaran tahun 2024 sebesar

Rp.60.571.082,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV Rp.54.117.150,00 atau sebesar 89,34%.

C. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan, dengan indikator kinerja yaitu:

iii. Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) (Triliyun)

(Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 98,39%)

Yang meliputi kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Perubahan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Perubahan Renja serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Perubahan Renja dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk ketersediaan dan pengembangan sarana pertanian untuk meningkatkan jumlah produksi pertanian, persentase kelompok tani yang menerapkan sop (standar operasional prosedur) budidaya pertanian, produktivitas pertanian per hektar per tahun dan persentase ternak unggul. Nilai Perubahan Renja tahun 2024 sebesar Rp.798.100.111,00, nilai pagu sebesar Rp.936.389.611,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV ini sebesar Rp.817.743.484,00 atau sebesar 87,33%.

b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini bertujuan pembangunan prasarana pertanian. nilai Perubahan Renja tahun 2024 sebesar Rp.4.326.429.526,00, nilai pagu anggaran

sebesar Rp.3.618.429.526,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV ini sebesar Rp.2.342.645.966,00 atau sebesar 64,74%.

c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini bertujuan menekan perkembangan dan penyebaran penyakit hewan menular strategis dan pengawasan hewan dan produk hewan. Nilai Perubahan Renja tahun 2024 sebesar Rp.632.329.000,00, nilai pagu anggaran sebesar Rp.632.472.830,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV ini sebesar Rp.516.322.320,00 atau sebesar 81,64%.

d) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini bertujuan perlindungan produksi pertanian terhadap serangan OPT dan Bencana Pertanian. Adapun capaian kinerja program ini adalah persentase pengendalian dan pengendalian bencana pertanian sampai 100 (seratus) persen. Nilai Perubahan Renja tahun 2024 sebesar Rp.248.000.000,00, nilai pagu anggaran sebesar Rp.243.358.000,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV ini sebesar Rp.178.831.620,00 atau sebesar 73,48%.

e) Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah usaha pertanian yang memiliki izin usaha di sektor pertanian. Nilai Perubahan Renja tahun 2024 sebesar Rp.0,00. Capaian kinerja program ini adalah persentase usaha pertanian yang memiliki izin usaha sampai sebesar 34 (tiga puluh empat) persen. Tahun 2024 program ini tidak dianggarkan.

f) Program Penyuluhan Pertanian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah Kelompok Tani naik kelas sebanyak 100 (seratus) unit dan Balai Penyuluh Pertanian yang naik kelas sebanyak 1 (satu) unit. Nilai Perubahan Renja tahun 2024 sebesar Rp.10.515.108.784,00, nilai pagu anggaran sebesar Rp.10.116.600.000,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV ini sebesar Rp.9.110.888.283,00 atau sebesar 90,06%.

BAB III
PEMBAHASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS
PERTANIAN DAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 520/186/Kpts/DISTAN-PS/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Penetapan IKU Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah serta tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu :

a) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian

Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian terhadap rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk menentukan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian adalah Laporan Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah.

b) Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian

Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian

untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah. Untuk menentukan Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian adalah hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA

c) Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)

Indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) digunakan untuk melihat besarnya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB. Untuk menentukan Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) adalah Jumlah PDRB dari sektor pertanian berdasarkan ADHK dalam 1 (satu) tahun.

Target dan capaian realisasi IKU Dinas Pertanian dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE -					RASIO REALISASI TAHUN KE -				
							2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
1	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tani	Nilai Tukar Petani	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	88,64 (A)	89,09 (A)	89,53 (A)	89,98 (A)	90,43 (AA)	88,77 (A)	88,92 (A)	88,92 (A)	-	-	100,15	99,81	99,32	-	-
2	Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah			Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	85	100	100	100	100	85	92	78	-	-	100,00	92,00	90,00	-	-
				Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Rp. Trilyun	2,98	3,04	3,10	3,16	3,23	2,98	3,05	3,05	-	-	100,00	100,33	98,39	-	-
Rata-rata																	100,05	97,38	95,90	-	-

Catatan : Data capaian Nilai AKIP Dinas Pertanian Tahun 2024 Memakai Data Capaian Tahun 2023
 Data capaian Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2024 Memakai Data Capaian Tahun 2023
 Sumber : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Dari Tabel 3.1 diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian IKU Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebesar 95,90% dengan prediket **sangat baik**. Capaian tertinggi pada sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian yaitu sebesar 99,32% dan yang terendah adalah sasaran Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah dengan indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian yaitu sebesar 90%.

3.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) maupun indikator sasaran (impact). Suatu IKD dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian IKD berkenaan setelah program prioritas ditetapkan. Penetapan IKD bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Penetapan IKD bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi :

- a) Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah; dan
- b) Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi IKK dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek Kesejahteraan Masyarakat, aspek Pelayanan Umum, dan aspek Daya Saing Daerah.

a) Indikator Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial. Indikator Kinerja

Makro Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dapat dilihat seperti Tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Makro Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Outlook 2021	Target Setiap Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)		70,06	70,21	70,59	70,98	71,39	71,68
	a. Usia Harapan Hidup	Tahun	71,04	71,22	71,39	71,57	71,74	71,92
	b. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,29	8,32	8,35	8,38	8,40	8,43
	c. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,36	13,40	13,45	13,49	13,53	13,57
	d. Pengeluaran Perkapita	Ribu Rp/org/thn	9.325	9.369	9.534	9.734	9.949	10.182
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,55	2,89	4,14	4,52	4,62	4,74
3	PDRB ADHK	Rp. Triliun	9,711	9,992	10,409	10,879	11,382	11,923
4	PDRB Perkapita ADHK	Rp. Juta	19,69	20,05	20,66	21,37	22,12	22,94
5	Indek Gini		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,93	6,85	6,73	6,61	6,46	6,30
7	Tingkat Kemiskinan	%	7,79	7,67	7,55	7,42	7,29	7,16
8	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu jiwa	38,43	38,25	38,03	37,78	37,51	37,21

Sumber : RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan secara langsung mendukung pencapaian indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat (Indikator Kinerja Makro Ekonomi) yaitu PDRB ADHK, kemudian Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan merepresentasikannya ke dalam target kinerja perangkat daerah yaitu Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK). Target dan realisasi nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Realisasi Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2022 - 2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi		
			2022	2023	2024*
1	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Rp. Triliyun	2,98	3,05	3,05

Catatan : * : Data Capaian Tahun 2023

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.3 diatas dapat diuraikan bahwa nilai PDRB Sektor Pertanian tahun 2022 sebesar 2,98 triliyun, tahun 2023 sebesar 3,05 triliyun dan tahun 2024 sebesar 3,05 triliyun (memakai angka capai tahun 2023, karena nilai PDRB Sektor Pertanian tahun 2024 belum publikasi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan). Kontribusi Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) tahun 2022 terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan (ADHK) sebesar 28,47%, tahun 2023 sebesar 28,06% dan tahun 2024 sebesar 28,06%. Dari angka capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) sebagai penyumbang terbesar terhadap Nilai PDRB (ADHK) Kabupaten Pesisir Selatan selama 3 (dua) tahun berturut - turut. Kontribusi per sub sektor terhadap PDRB Sektor Pertanian secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4
Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB Sektor
Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 - 2024

No	Sub Sektor	Tahun		
		2022	2023	2024*
1	Tanaman Pangan	11,34	11,57	11,57
2	Tanaman Hortikultura Semusim	0,84	0,90	0,90
3	Perkebunan Semusim	0	0	0
4	Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	1,22	1,12	1,12
5	Perkebunan Tahunan	11,67	11,09	11,09
6	Peternakan	2,80	2,80	2,80
7	Jasa Pertanian dan Perburuan	0,59	0,58	0,58
Total		28,47	28,06	28,06

Catatan : * : Data Capaian Tahun 2023

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan

Pada Tabel 3.4 diatas dapat dijelaskan bahwa sub sektor perkebunan tahunan merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB Sektor Pertanian yang kemudian diikuti oleh sub sektor tanaman pangan, peternakan, tanaman hortikultura tahunan dan lainnya, tanaman hortikultura semusim dan jasa pertanian dan perburuan. Sub sektor perkebunan tahunan banyak disumbangkan pada komoditi kelapa sawit dan tanaman pangan pada komoditi padi dan jagung.

b) Indikator Pada Aspek Pelayanan Umum

Indikator pada Aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yaitu Layanan Urusan Wajib Dasar dan Layanan Urusan Pilihan. Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kewenangan Layanan Urusan Pilihan.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sesuai Peraturan Pemerintah tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan Layanan Urusan Pilihan sektor pertanian yang terdiri dari 2 (dua) IKK seperti pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Sektor Pertanian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus
1	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per tahun
			Luas panen
2	Pertanian	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	$\frac{(\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus penyakit hewan menular tahun } n - \text{Jumlah kejadian penyakit/kasus penyakit hewan menular tahun } n-1)}{\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus penyakit hewan menular tahun } n-1} \times 100\%$

Data capaian realisasi IKK urusan pemerintahan sektor pertanian dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini :

Tabel 3.6
Capaian Realisasi IKK Urusan Pemerintahan Sektor Pertanian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Realisasi IKK		
				2022	2023	2024
1	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ha	6,89	6,16	5,70*
2	Pertanian	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	5,86	-81,26	4,52

Catatan : * Angka Sementara (ASEM Tahun 2024)

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.6 diatas dapat dilihat bahwa capaian IKK produktivitas pertanian per hektar per tahun pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 9,58% (dari 6,16 ton/ha menjadi 5,70 ton/ha), hal ini disebabkan turunnya produktivitas padi dan jagung yang mana pada tahun 2022 produktivitas padi tahun 2023 sebesar 5,20 ton/ha menjadi 4,80 ton/ha tahun 2024 dan jagung dari 8,66 ton/ha pada tahun 2023 menjadi 7,40 ton/ha tahun 2024.

Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular dari -81,26% pada tahun 2023 menjadi 4,52% tahun 2024. Selama tahun 2024 jumlah kasus penyakit jembrana mengalami peningkatan kejadian sebesar 85,68% dari tahun 2023.

c) Indikator Kinerja Pada Aspek Daya Saing Daerah

Indikator Kinerja pada Aspek Daya Saing Daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Melalui Laporan Evaluasi Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya dalam memenuhi harapan masyarakat.

Kegiatan yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten pada kondisi triwulan IV tahun 2024, secara garis besar telah berhasil sesuai dengan tugas pokok, fungsi, visi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis perspektif layanan dan perspektif stakeholder yang merupakan dampak dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dari perspektif layanan berhasil dicapai Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Seluruh sasaran yang ditetapkan sebagian besar dapat tercapai, bahkan beberapa diantaranya mampu melampaui target, meskipun masih ada beberapa sasaran yang belum sesuai dengan yang diharapkan; dan
3. Belum seluruh sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang diharapkan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut sejak dari perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

4.2 Rekomendasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tentunya tidak terlepas dari hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan melakukan evaluasi secara berkala sehingga kendala/hambatan yang dijumpai dapat dideteksi secara dini dan diatasi segera sehingga tidak berdampak pada tertundanya pekerjaan selanjutnya. Untuk itu sebagai bahan rekomendasi kepada setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi horizontal, vertikal, dan diagonal baik internal maupun lintas unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran, sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja dan Renstra untuk Tahun anggaran berikutnya;
2. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang direncanakan; dan
3. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan unit kerja bersangkutan.

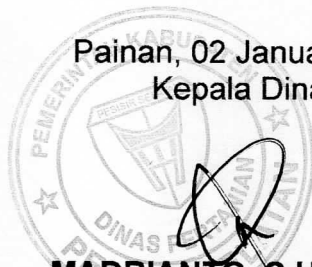
Akhirnya dengan disusunnya Laporan ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal laporan ini akan menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan sasaran strategis dalam Renstra tahun 2021-2026.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, dapat memperoleh gambaran kinerja Dinas Pertanian

Kabupaten Pesisir Selatan sepanjang Tahun 2024. Di masa mendatang, Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan akan melakukan berbagai langkah untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja dan pelaporannya agar terwujud transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan.

Painan, 02 Januari 2025

Kepala Dinas



MADRIANTO, S.Hut., M.H.

NIP. 19780519 200501 1 009

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV Tahun 2024 (Keadaan sampai bulan 31 Desember 2024)

- Indikator Dan Target Kinerja Dinas Pertanian Yang Mengacu Pada Sasaran RKPD:
1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

: 1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
2. Nilai SAKIP
3. Skor LPPD
4. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

: 1. Indeks Inovasi
3. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan

: 1. Nilai PDRB Pertanian (ADHK)
2. Nilai PDRB Industri Pengolahan (ADHK)

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target Rencana Strategis Dinas Pertanian pada Tahun 2026 (Akhir Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Kerja sampai dengan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dinas Pertanian yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Strategis Dinas Pertanian s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Strategis Dinas Pertanian s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14 = 7 + 13	Rp	15 = 14/6 x 100%	Rp	16
		3	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN		K		K		K		K		K		K		K		K		K		K		
		3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			297.172.939.218,00		91.257.592.556,00		36.086.434.523,00		5.531.519.511,00		5.183.269.268,00		9.429.386.582,00		9.927.249.782,00		30.071.425.143,00		-	121.329.017.699,00		40,83
1	1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	3.27.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	KETERCAPAIAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH (%)	100,00	107.458.455.714,00	91,90	35.199.189.720,00	-	19.566.467.102,00	-	4.898.701.211,00	-	4.335.629.025,00	-	3.693.524.027,00	-	4.177.139.207,00	-	17.104.993.470,00	91,90	52.304.183.190,00	91,90	48,67	Dinas Pertanian
				PERSENTASE KELENGKAPAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI (%)	100,00		40,00		20,00		5,00		5,00		5,00		5,00		20,00		60,00		60,00		
				KETEPATAN WAKTU PELAPORAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	0 Delay Pelaporan		0 Delay Pelaporan		0 Delay Pelaporan		-		-		-		0 Delay Pelaporan		0 Delay Pelaporan		0 Delay Pelaporan		0 Delay Pelaporan		
				PERSENTASE KINERJA BIDANG YANG TERCAPAI (%)	91%-100% (Sangat Baik)		91%-100% (Sangat Baik)		91%-100% (Sangat Baik)		-		-		-		91%-100% (Sangat Baik)		91%-100% (Sangat Baik)		91%-100% (Sangat Baik)		91%-100% (Sangat Baik)		
				JUMLAH INOVASI DINAS PERTANIAN (JENIS)	5,00		2,00		1,00		-		-		1,00		-		1,00		1,00		3,00		
1		3.27.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)	100,00	1.498.968.350,00	99,16	472.637.400,00	-	241.376.099,00	-	33.707.500,00	-	51.805.000,00	-	44.967.500,00	-	96.090.750,00	-	226.570.750,00	99,16	699.208.150,00	99,16	46,65	Dinas Pertanian
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (Dokumen)	188,00		94,00		47,00		15,00		15,00		7,00		10,00		47,00		141,00		75,00		
1		3.27.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	21,00	206.405.640,00	9,00	83.918.950,00	4,00	31.205.550,00	2,00	6.405.000,00	1,00	9.359.250,00	1,00	4.230.000,00	-	11.062.250,00	4,00	31.056.500,00	13,00	114.975.450,00	61,90	55,70	
2		3.27.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4,00	47.500.000,00	-	-	1,00	7.999.800,00	-	-	-	-	-	1,00	7.830.500,00	1,00	7.830.500,00	1,00	7.830.500,00	25,00	16,49		
3		3.27.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4,00	47.150.000,00	-	-	1,00	7.999.838,00	-	-	-	-	1,00	7.748.500,00	-	-	1,00	7.748.500,00	1,00	7.748.500,00	25,00	16,43	
4		3.27.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	16,00	43.520.000,00	4,00	-	4,00	4.999.978,00	4,00	4.872.500,00	-	-	-	-	-	4,00	4.872.500,00	8,00	4.872.500,00	50,00	11,20		
5		3.27.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	300,00	1.154.392.710,00	120,00	388.718.450,00	60,00	189.170.933,00	15,00	22.430.000,00	15,00	42.445.750,00	15,00	32.989.000,00	15,00	77.198.000,00	60,00	175.062.750,00	180,00	563.781.200,00	60,00	48,84	
2		3.27.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan (%)	100,00	92.490.501.382,00	40,00	32.513.377.828,00	20,00	18.332.135.259,00	5,00	4.838.160.211,00	5,00	4.006.971.793,00	5,00	3.426.749.516,00	5,00	3.781.518.733,00	20,00	16.053.400.253,00	60,00	48.566.778.081,00	60,00	52,51	
6		3.27.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	893,00	90.557.407.565,00	370,00	31.834.274.452,00	178,00	17.662.763.621,00	45,00	4.753.781.211,00	45,00	3.850.984.689,00	45,00	3.280.657.256,00	43,00	3.535.340.901,00	178,00	15.420.764.057,00	548,00	47.255.038.509,00	61,37	52,18	
7		3.27.01.2.02.0002.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5,00	1.908.068.317,00	2,00	679.103.376,00	1,00	666.790.000,00	0,25	81.900.000,00	0,25	155.987.104,00	0,25	146.092.260,00	0,25	246.177.832,00	1,00	630.157.196,00	3,00	1.309.260.572,00	60,00	68,62	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target Rencana Strategis Dinas Pertanian pada Tahun 2026 (Akhir Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Kerja sampai dengan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dinas Pertanian yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Strategis Dinas Pertanian s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Strategis Dinas Pertanian s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
8		3.27.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4,00	25.025.500,00	-	-	1,00	2.581.638,00	1,00	2.479.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	2.479.000,00	1,00	2.479.000,00	25,00	9,91	
3		3.27.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertibnya penatausahaan barang milik daerah SKPD (%)	100,00	484.705.000,00	25,00	40.716.400,00	25,00	55.000.000,00	6,25	-	6,25	19.898.500,00	6,25	7.611.900,00	6,25	26.382.900,00	25,00	53.893.300,00	50,00	94.609.700,00	50,00	19,52	
9		3.27.01.2.03.0001	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4,00	450.000.000,00	1,00	40.716.400,00	1,00	55.000.000,00	0,25	-	0,25	19.898.500,00	0,25	7.611.900,00	0,25	26.382.900,00	1,00	53.893.300,00	2,00	94.609.700,00	50,00	21,02	
10		3.27.01.2.03.0006	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	39,00	15.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11		3.27.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4,00	19.205.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		3.27.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100,00	1.560.738.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah ASN Dinas Pertanian yang mengikuti Pendidikan dan Latihan (orang)	20,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12		3.27.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	1.200,00	1.049.994.375,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13		3.27.01.2.05.0005.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	48,00	21.025.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14		3.27.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	20,00	429.420.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15		3.27.01.2.05.0010.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	1.200,00	60.298.525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5		3.27.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100,00	2.879.770.540,00	100,00	662.349.748,00	-	352.294.034,00	-	3.699.500,00	-	119.230.333,00	-	77.450.012,00	-	100.970.330,00	-	301.350.175,00	100,00	963.699.923,00	100,00	33,46	
				Persentase Pengaduan/Saran yang ditindaklanjuti (%)	100,00		25,00		25,00		6,25		6,25		6,25		6,25		25,00		50,00		50,00		
				Persentase Dokumen Publik dan Dipublish (%)	98,00		70,09		25,91		6,48		6,48		6,48		6,48		25,91		96,00		97,96		
				Persentase Pelayanan Kepegawaian dan Perkantoran (%)	100,00		25,00		25,00		6,25		6,25		6,25		6,25		25,00		50,00		50,00		
16		3.27.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5,00	94.268.290,00	2,00	23.558.680,00	1,00	8.267.452,00	0,25	-	0,25	-	0,25	394.272,00	0,25	5.989.680,00	1,00	6.383.952,00	3,00	29.942.632,00	60,00	31,76	
17		3.27.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	73,00	507.168.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18		3.27.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8,00	183.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19		3.27.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5,00	360.428.110,00	2,00	72.420.610,00	1,00	44.394.501,00	0,25	-	0,50	33.520.000,00	-	-	0,25	9.180.000,00	1,00	42.700.000,00	3,00	115.120.610,00	60,00	31,94	
20		3.27.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5,00	324.856.140,00	2,00	73.647.400,00	1,00	16.176.581,00	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	11.417.150,00	1,00	11.417.150,00	3,00	85.064.550,00	60,00	26,19	
21		3.27.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	15,00	31.640.000,00	6,00	10.440.000,00	3,00	5.400.000,00	0,75	-	0,75	2.400.000,00	0,75	1.290.000,00	0,75	1.560.000,00	3,00	5.250.000,00	9,00	15.690.000,00	60,00	49,59	
22		3.27.01.2.06.0008.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	60,00	69.970.000,00	24,00	17.212.000,00	12,00	10.780.000,00	3,00	-	3,00	2.485.000,00	3,00	2.661.000,00	3,00	1.364.000,00	12,00	6.510.000,00	36,00	23.722.000,00	60,00	33,90	
23		3.27.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.250,00	1.223.240.000,00	500,00	465.071.058,00	250,00	257.275.500,00	62,50	3.699.500,00	62,50	71.985.733,00	62,50	72.488.740,00	62,50	71.459.500,00	250,00	219.633.473,00	750,00	684.704.531,00	60,00	55,97	
24		3.27.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4,00	85.000.000,00	-	-	1,00	10.000.000,00	0,25	-	0,25	8.839.600,00	0,25	616.000,00	0,25	-	1,00	9.455.600,00	1,00	9.455.600,00	25,00	11,12	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target Rencana Strategis Dinas Pertanian pada Tahun 2026 (Akhir Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Kerja sampai dengan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dinas Pertanian yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Strategis Dinas Pertanian s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Strategis Dinas Pertanian s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
38		3.27.02.2.01.0009.	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	2.000,00	-	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	#DIV/0!
39		3.27.02.2.01.0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
10		3.27.02.2.02.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Kabupaten Pesisir Selatan Yang Dimurnikan dan dilestarikan (Jenis)	54,00	17.721.456.170,00	12,00	2.105.796.729,00	6,00	100.000.000,00	1,50	6.950.000,00	1,50	23.387.000,00	1,50	19.968.394,00	1,50	40.743.990,00	6,00	91.049.384,00	18,00	2.196.846.113,00	33,33	12,40	
				Jumlah Benih Tanaman Pangan yang tersedia (Kg)	50.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Bibit Buah-Buahan yang tersedia (Batang)	12.880,00		4.110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.110,00		31,91		
				Jumlah Benih Sayur - Sayuran yang tersedia (Kg)	5.001,00		3.001,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.001,37		60,02		
				Tersedianya bibit Perkebunan yang tersedia (Batang)	84.010,00		4.960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.960,00		5,90		
				Jumlah Frozen Semen yang disediakan (straw)	10.500,00		2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00		19,05		
				Persentase Penggunaan Benih Unggul Pertanian (%)	75,00		61,92	66,25	-	-	-	-	-	-	-	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25		88,33		
40		3.27.02.2.02.0001.	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/ Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian (VUB)	12,00	775.680.000,00	12,00	250.726.214,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	250.726.214,00	100,00	32,32	
41		3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	15,00	1.093.351.220,00	6,00	226.714.280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	226.714.280,00	40,00	20,74	
42		3.27.02.2.02.0003.	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	15,00	15.402.424.950,00	6,00	1.628.356.235,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	1.628.356.235,00	40,00	10,57	
43		3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian (Varietas Unggul Baru/VUB)	12,00	300.000.000,00	-	-	4,00	100.000.000,00	1,00	6.950.000,00	1,00	23.387.000,00	1,00	19.968.394,00	1,00	40.743.990,00	4,00	91.049.384,00	4,00	91.049.384,00	33,33	30,35	
44		3.27.02.2.02.0005.	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Laporan)	6,00	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11		3.27.02.2.03.	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	60,00	565.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jenis Pakan Ternak yang Tersedia (Jenis)	20,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45		3.27.02.2.03.0001.	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	60,00	245.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46		3.27.02.2.03.0002.	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	90,00	320.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12		3.27.02.2.04.	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase Pengawasan Kios atau Pengecer Obat Hewan yang dilakukan (%)	100,00	412.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47		3.27.02.2.04.0001.	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	68,00	310.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48		3.27.02.2.04.0002.	Penindakan atas penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak (Kasus)	4,00	102.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13		3.27.02.2.05.	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak (Laporan)	15,00	28.889.853.060,00	15,00	1.919.641.340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	1.919.641.340,00	100,00	6,64	
				Jumlah Frozen Semen yang disediakan (straw)	10.500,00		10.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.500,00		100,00		
				Persentase Ketersediaan Bibit Ternak Unggul (IB) (%)	50,00		33,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,33		66,66		
				Jumlah Ternak yang tersedia (Ekor)	71.149,00		10.924,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.924,00		15,35		
49		3.27.02.2.05.0001.	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar (Laporan)	2,00	12.861.900.000,00	2,00	1.020.594.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1.020.594.800,00	100,00	7,94	
50		3.27.02.2.05.0003.	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak Yang Beredar dan Bersertifikat (Ekor)	44.000,00	2.489.009.950,00	10.000,00	231.402.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	231.402.750,00	22,73	9,30	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target Rencana Strategis Dinas Pertanian pada Tahun 2026 (Akhir Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Kerja sampai dengan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dinas Pertanian yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Strategis Dinas Pertanian s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Strategis Dinas Pertanian s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
									I		II		III		IV				K	Rp		K	Rp			
					9	10	11	12	13	14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
51		3.27.02.2.05.0004.	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/ Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/ Pakan yang beredar (Ton)	40.000,00	190.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
52		3.27.02.2.05.0005.	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia (Ton)	40.000,00	2.408.999.960,00	10.000,00	483.682.720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	483.682.720,00	25,00	20,08			
53		3.27.02.2.05.0006.	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	25,00	498.043.150,00	10,00	183.961.070,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	183.961.070,00	40,00	36,94			
54		3.27.02.2.05.0008.	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar (Laporan)	3,00	10.241.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
55		3.27.02.2.05.0009.	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia (Laporan)	3,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14		3.27.02.2.06.	Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Ketersediaan Bibit Ternak Unggul (IB) (%)	50,00	1.000.800.186,00	33,33	40,00	333.600.062,00	-	30.000.000,00	-	66.025.300,00	-	47.260.000,00	40,00	173.135.000,00	40,00	316.420.300,00	40,00	316.420.300,00	40,00	316.420.300,00	80,00	31,62	
56		3.27.02.2.06..0004.	Pengadaan Benih Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Dosis)	30.000,00	1.000.800.186,00	-	10.000,00	333.600.062,00	2.500,00	30.000.000,00	2.500,00	66.025.300,00	2.500,00	47.260.000,00	2.500,00	173.135.000,00	10.000,00	316.420.300,00	10.000,00	316.420.300,00	33,33	31,62			
III	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	3.27.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	JUMLAH PRODUKSI PERTANIAN (TON)	2.624.114,00	83.585.710.609,00	991.713,00	24.414.030.427,00	524.579,00	4.326.429.526,00	-	4.625.000,00	-	50.576.795,00	-	1.357.469.251,00	487.867,00	929.974.920,00	487.867,00	2.342.645.966,00	1.479.580,00	26.756.676.393,00	56,38	32,01		
				JUMLAH INDEKS PERTANAMAN PER TAHUN (KALI)	2,00		1,70		1,79		-		-		-		1,78		1,78		1,78		89,00			
				PERSENTASE PENGELOLAAN WILAYAH SUMBER BIBIT DAN RUMPUNG/GALUR TERNAK (%)	100,00		20,00		25,00		6,25		6,25		6,25		6,25		25,00		45,00		45,00			
				PERSENTASE PENGADUAAAN/SARAN SEKTOR PERTANIAN YANG DITINDAKLANJUTI (%)	100,00		20,00		25,00		6,25		6,25		6,25		6,25		25,00		45,00		45,00			
15		3.27.03.2.01.	Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dilindungi dari alih fungsi (Ha)	22.746,10	1.038.224.000,00	22.746,10	-	22.746,10	1.548.929.526,00	-	-	-	-	-	118.107.000,00	-	352.937.850,00	22.746,10	471.044.850,00	22.746,10	471.044.850,00	100,00	45,37		
57		3.27.03.2.02.0003.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	4,00	130.153.000,00	-	-	1,00	1.548.929.526,00	-	-	0,33	-	0,33	118.107.000,00	0,33	352.937.850,00	1,00	471.044.850,00	1,00	471.044.850,00	25,00	361,92		
58		3.27.03.2.01.0015.	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang Dikelola (Dokumen)	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang Dikelola (Dokumen)	4,00	908.071.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16		3.27.03.2.02.	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Indeks Pertanaman per Tahun (kali)	2,33	80.947.297.549,00	1,62	24.033.513.957,00	-	2.777.500.000,00	-	4.625.000,00	-	50.576.795,00	-	1.239.362.251,00	-	577.037.070,00	-	1.871.601.116,00	1,62	25.905.115.073,00	69,53	32,00		
		Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian dan Puskesmas yang representatif (unit)	3,00	3,00	-		-		-		-		-		3,00		100,00									
		Persentase Lahan Sawah Beririgasi Baik (%)	76,51	74,77	0,58		0,15		0,15		0,15		0,15		0,58		75,35		98,48							
		Persentase Jalan Pertanian Berkondisi Baik (%)	93,86	78,86	5,00		1,25		1,25		1,25		1,25		5,00		83,86		89,35							
		Persentase Prasarana Pelayanan Pertanian Yang Berkondisi Baik (%)	75,83	54,84	6,99		1,75		1,75		1,75		1,75		6,99		61,83		81,54							
59		3.27.03.2.02.0001.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara (Unit)	40,00	7.391.044.660,00	40,00	6.403.845.772,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	6.403.845.772,00	100,00	86,64			
60		3.27.03.2.02.0002.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	4,00	2.003.550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61		3.27.03.2.02.0003.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	135,00	33.518.758.049,00	60,00	10.090.218.250,00	9,00	1.446.750.000,00	2,25	4.625.000,00	2,25	50.376.795,00	4,50	1.235.815.131,00	-	150.180.070,00	9,00	1.440.996.996,00	69,00	11.531.215.246,00	51,11	34,40		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target Rencana Strategis Dinas Pertanian pada Tahun 2026 (Akhir Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Kerja sampai dengan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dinas Pertanian yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Strategis Dinas Pertanian s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Strategis Dinas Pertanian s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV				14 = 7 + 13			15 = 14/6 x 100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100%	16										
62		3.27.03.2.02.0004.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	11,00	2.322.244.000,00	3,00	406.042.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	406.042.500,00	27,27	17,48					
63		3.27.03.2.02.0007.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	1,00	1.001.000.000,00	1,00	11.222.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	11.222.000,00	100,00	1,12					
64		3.27.03.2.02.0008.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	15,00	7.497.857.950,00	3,00	1.179.172.150,00	1,00	510.750.000,00	-	0,25	200.000,00	0,50	3.547.120,00	0,25	417.737.000,00	1,00	421.484.120,00	4,00	1.600.656.270,00	26,67	21,35		
65		3.27.03.2.02.0009.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	44,00	9.324.842.890,00	21,00	5.943.013.285,00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,00	5.943.013.285,00	47,73	63,73					
66		3.27.03.2.02.0010.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	60,00	11.888.000.000,00	-	-	20,00	820.000.000,00	-	-	-	-	-	9.120.000,00	-	9.120.000,00	-	9.120.000,00	-	-	0,08		
67		3.27.03.2.02.0014.	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!				
68		3.27.03.2.02.0015.	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	1,00	6.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17		3.27.03.2.03.	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Dalam Kabupaten/Kota (Laporan)	75,00	1.169.059.060,00	15,00	380.516.470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	380.516.470,00	20,00	32,55					
				Jumlah Jenis Rumpun Ternak/Galur Ternak Yang Dikelola (Jensi)	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
69		3.27.03.2.03.0001.	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	75,00	1.048.721.560,00	15,00	380.516.470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	380.516.470,00	20,00	36,28					
70		3.27.03.2.03.0002.	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)	60,00	120.337.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18		3.27.03.2.04.	Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum (Ha)	10.000,00	431.130.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
71		3.27.03.2.04.0001.	Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang diidentifikasi dan ditetapkan (Ha)	10.000,00	143.710.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
72		3.27.03.2.04.0002.	Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang dikelola (Ha)	10.000,00	143.710.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
73		3.27.03.2.04.0003.	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum (Laporan)	60,00	143.710.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IV	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	3.27.04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (KASUS)	140,00	10.031.627.700,00	155,00	412.095.091,00	-	632.329.000,00	-	15.741.800,00	-	134.938.800,00	-	80.309.800,00	-	285.331.920,00	-	516.322.320,00	155,00	928.417.411,00	110,71	9,25	
				PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN PENYAKIT HEWAN/TERNAK (%)	4,91	-	4,28	0,19	-	-	-	-	-	-	0,41	-	0,41	-	4,69	-	95,55	-	-		
				PERSENTASE PRODUK PANGAN HEWANI YANG AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL (ASUH) UNTUK DIKONSUMSI (%)	100,00	-	40,00	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	-	60,00	-	60,00	-	98,81	-	-		
19		3.27.04.2.01.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terjaminnya kesehatan hewan/ternak dan kematian ternak di Kabupaten Pesisir Selatan (Bulan)	12,00	5.695.377.270,00	12,00	161.000.510,00	-	314.545.170,00	-	-	36.289.000,00	-	47.840.000,00	-	107.998.920,00	-	192.127.920,00	12,00	353.128.430,00	100,00	6,20		
				Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (PHM) (%)	5,00	-	4,35	0,20	-	-	-	-	-	-	0,05	-	0,05	-	4,40	-	87,90	-	-		
				Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan dan Rabies (%)	3,37	-	3,23	0,10	-	-	-	-	-	-	0,10	-	0,10	-	3,33	-	98,81	-	-		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target Rencana Strategis Dinas Pertanian pada Tahun 2026 (Akhir Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Kerja sampai dengan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dinas Pertanian yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Strategis Dinas Pertanian s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Strategis Dinas Pertanian s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
									I		II		III		IV												
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11			12		13		14 = 7 + 13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
74		3.27.04.2.01.0001.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Laporan)	30,00	2.190.812.660,00	30,00	37.232.720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	37.232.720,00	100,00	1,70			
75		3.27.04.2.01.0002.	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam Satu Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	30,00	2.748.564.610,00	30,00	93.825.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	93.825.020,00	100,00	3,41			
76		3.27.04.2.01.0003.	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Penyakit Hewan Menular)	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	60,00	360.000.000,00	15,00	29.942.770,00	15,00	28.000.000,00	3,75	-	3,75	8.689.000,00	3,75	1.860.000,00	3,75	2.816.120,00	15,00	13.365.120,00	30,00	43.307.890,00	50,00	12,03			
77		3.27.04.2.01.0006.	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	7.335,00	210.000.000,00	-	-	2.445,00	33.055.000,00	611,25	-	611,25	6.405.000,00	611,25	7.270.000,00	611,25	7.165.200,00	2.445,00	20.840.200,00	2.445,00	20.840.200,00	33,33	9,92			
78		3.27.04.2.01.0008.	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	45,00	186.000.000,00	-	-	15,00	253.490.170,00	3,75	-	3,75	21.195.000,00	3,75	38.710.000,00	3,75	98.017.600,00	15,00	157.922.600,00	15,00	157.922.600,00	33,33	84,90			
20		3.27.04.2.02.	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	Terwujudnya pengawasan pemasukan dan pengeluaran ternak di Kabupaten Pesisir Selatan (Laporan)	15,00	850.601.210,00	15,00	81.516.850,00	-	45.599.913,00	-	-	-	10.107.500,00	-	4.320.000,00	-	15.601.000,00	-	30.028.500,00	15,00	111.545.350,00	100,00	13,11			
				Jumlah Check Point yang Aktif (Unit)	12,00		3,00		3,00		0,75		0,75		0,75		0,75		3,00		6,00		50,00				
79		3.27.04.2.02.0001	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan (Laporan)	3,00	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
80		3.27.04.2.02.0002	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	3,00	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
81		3.27.04.2.02.0003.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	24,00	370.601.210,00	24,00	81.516.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00	81.516.850,00	100,00	22,00			
82		3.27.04.2.02.0004.	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)	3,00	120.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
83		3.27.04.2.02.0006.	Pengawasan dan pemeriksaan kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM (Laporan)	36,00	210.000.000,00	-	-	12,00	45.599.913,00	3,00	-	3,00	10.107.500,00	3,00	4.320.000,00	3,00	15.601.000,00	12,00	30.028.500,00	12,00	30.028.500,00	33,33	14,30			
21		3.27.04.2.03.	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner (Laporan)	12,00	2.058.936.720,00	12,00	310.553.971,00	-	168.839.000,00	-	2.000.000,00	-	63.479.000,00	-	8.340.000,00	-	132.713.200,00	-	206.532.200,00	12,00	517.086.171,00	100,00	25,11			
				Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan yang memenuhi standar layanan Tipe B (Unit)	21,00		2,00		5,00		1,25		1,25		1,25		1,25		5,00		7,00		33,33				
				Persentase Petugas Medik dan Paramedik Veteriner yang memiliki kompetensi (%)	100,00		58,33		16,67		4,17		4,17		4,17		4,17		16,67		75,00		75,00				
84		3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	5,00	447.066.200,00	2,00	26.944.530,00	1,00	15.000.000,00	0,25	-	0,25	10.915.000,00	0,25	1.930.000,00	0,25	3.462.200,00	1,25	16.307.200,00	3,25	43.251.730,00	65,00	9,67			
85		3.27.04.2.03.0002.	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	60,00	1.611.870.520,00	24,00	283.609.441,00	12,00	153.839.000,00	3,00	2.000.000,00	3,00	52.564.000,00	3,00	6.410.000,00	3,00	129.251.000,00	12,00	190.225.000,00	36,00	473.834.441,00	60,00	29,40			
22		3.27.04.2.04.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jenis Produk Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal/ASUH (Jenis)	5,00	1.366.712.500,00	5,00	82.019.420,00	-	103.344.917,00	-	13.741.800,00	-	25.063.300,00	-	19.809.800,00	-	29.018.800,00	-	87.633.700,00	5,00	169.653.120,00	100,00	12,41			
				Jumlah Jenis Produk Hewan yang diawasi (Jenis)	25,00		10,00		5,00		1,25		1,25		1,25		1,25		5,00		15,00		60,00				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target Rencana Strategis Dinas Pertanian pada Tahun 2026 (Akhir Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Kerja sampai dengan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dinas Pertanian yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Strategis Dinas Pertanian s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Strategis Dinas Pertanian s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
									I		II		III		IV												
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11			12		13		14 = 7 + 13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Unit Usaha yang memenuhi persyaratan teknis hygiene sanitasi untuk mendapatkan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner(NKV) (Unit)	6,00		-		1,00		0,25		0,25		0,25		1,00		1,00		1,00		16,67				
86		3.27.04.2.04.0001.	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	4,00	694.550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
87		3.27.04.2.04.0002.	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	5,00	261.081.250,00	2,00	82.019.420,00	1,00	82.017.054,00	0,25	9.945.000,00	0,25	19.384.500,00	0,25	14.258.000,00	0,25	25.299.400,00	1,25	68.886.900,00	3,25	150.906.320,00	65,00	57,80			
88		3.27.04.2.04.0003.	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang ditetapkan (Laporan)	6,00	261.081.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
89		3.27.04.2.04.0004.	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	3,00	150.000.000,00	-	-	1,00	21.327.863,00	0,25	3.796.800,00	0,25	5.678.800,00	0,25	5.551.800,00	0,25	3.719.400,00	1,25	18.746.800,00	1,25	18.746.800,00	41,67	12,50			
23		3.27.04.2.05.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan (Laporan)	3,00	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90		3.27.04.2.05.0001	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan (Laporan)	3,00	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	3.27.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (%)	100,00	4.650.077.285,00	40,00	419.216.770,00	20,00	248.000.000,00	5,00	13.743.000,00	5,00	93.272.120,00	5,00	18.215.000,00	5,00	53.601.500,00	20,00	178.831.620,00	60,00	598.048.390,00	60,00	12,86			
24		3.27.05.2.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Persentase Pengendalian Serangan Hama dan Penyakit Tumbuhan (%)	100,00	4.650.077.285,00	40,00	662.406.220,00	20,00	248.000.000,00	5,00	13.743.000,00	5,00	93.272.120,00	5,00	18.215.000,00	5,00	53.601.500,00	20,00	178.831.620,00	60,00	841.237.840,00	60,00	18,09			
				Luas Areal Lahan yang Dapat ditangani dari pasca bencana pertanian (Ha)	1.750,00		682,38		350,00		87,50		87,50		87,50		87,50		350,00		1.032,38		58,99				
91		3.27.05.2.01.0001.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	37.495,00	3.613.309.160,00	15.837,59	461.218.420,00	7.619,00	248.000.000,00	1.904,75	13.743.000,00	1.904,75	93.272.120,00	1.904,75	18.215.000,00	1.904,75	53.601.500,00	7.619,00	178.831.620,00	23.456,59	640.050.040,00	62,56	17,71			
92		3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah area terdampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dilangani (Ha)	100,00	96.363.125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
93		3.27.05.2.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (Laporan)	75,00	940.405.000,00	30,00	201.187.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	201.187.800,00	40,00	21,39			
VI	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	3.27.06.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	JUMLAH UNIT USAHA YANG DIBERIKAN REKOMENDASI IZIN USAHA (UNIT)	190,00	1.513.105.450,00	190,00	62.945.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,00	62.945.550,00	100,00	4,16			
				PERSENTASE USAHA PERTANIAN YANG MEMILIKI IZIN USAHA (%)	40,00		30,27		-		-		-		-		-		-		30,27		75,68				
25		3.27.06.2.01.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	10,00	852.444.200,00	10,00	62.945.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	62.945.550,00	100,00	7,38			
				Jumlah Usaha Pertanian yang Mengajukan Permohonan Rekomendasi/Daftar Izin Usaha (Unit)	48,00		12,00		-		-		-		-		-		-		12,00		25,00				
				Jumlah Usaha Pertanian yang diawasi (Unit)	775,00		295,00		-		-		-		-		-		-		295,00		38,06				
94		3.27.06.2.01.0001.	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	8,00	157.581.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
95		3.27.06.2.01.0002.	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	48,00	435.991.700,00	12,00	35.442.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	35.442.600,00	25,00	8,13			
96		3.27.06.2.01.0003.	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)	775,00	258.871.500,00	295,00	27.502.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295,00	27.502.950,00	38,06	10,62			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target Rencana Strategis Dinas Pertanian pada Tahun 2026 (Akhir Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Kerja sampai dengan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dinas Pertanian yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Strategis Dinas Pertanian s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Strategis Dinas Pertanian s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											I		II		III		IV										
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
26		3.27.06.2.02.	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Usaha Pertanian Yang Mengajukan Permohonan Rekomendasi/Daftar Izin Usaha (Unit) Jumlah Usaha Pertanian yang diawasi (Unit)	8,00 20,00	537.290.000,00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
97		3.27.06.2.02.0001.	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan (Dokumen)	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan (Dokumen)	60,00	139.710.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
98		3.27.06.2.02.0002.	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang diawasi (Laporan)	60,00	53.016.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
99		3.27.06.2.02.0003.	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang diawasi (Laporan)	40,00	53.016.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100		3.27.06.2.02.0004.	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan yang diawasi (Laporan)	4,00	255.870.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101		3.27.06.2.02.0005.	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi (Laporan)	4,00	35.677.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27		3.27.06.2.03.	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan (Laporan)	28,00	123.371.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102		3.27.06.2.03.0001.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang memenuhi komitmen (laporan)	8,00	35.677.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103		3.27.06.2.03.0002.	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang diawasi (laporan)	20,00	87.693.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	3.27.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	JUMLAH KELOMPOK TANI YANG NAIK KELAS (KELOMPOK)	619,00	20.895.733.864,00	319,00	12.055.422.961,00	100,00	10.515.108.784,00	-	331.873.800,00	-	479.440.228,00	-	4.212.640.110,00	130,00	4.086.934.145,00	130,00	9.110.888.283,00	449,00	21.166.311.244,00	72,54	101,29			
				JUMLAH BALAI PENYULUHAN PERTANIAN YANG NAIK KELAS (UNIT)	4,00		1,00		1,00		-		-		-		1,00		1,00		2,00		50,00				
28		3.27.07.2.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang Mampu Memenuhi 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) (%) Persentase Sumber Daya Manusia Penyuluhan Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%) Jumlah Kelembagaan Petani yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) Persentase Sarana Penyuluhan Pertanian Yang berkondisi baik (%) Persentase Prasarana Penyuluhan Pertanian Yang berkondisi baik (%) Persentase Kelembagaan Tani Yang Menerapkan Paket Teknologi Anjuran (%)	100,00 46,39 5.536,00 92,50 91,88 48,88	20.895.733.864,00	40,00 28,07 1.694,00 79,17 76,88 48,88	12.055.422.961,00	20,00 7,17 1.110,00 4,16 4,62 -	10.515.108.784,00	5,00 1,79 -	331.873.800,00	5,00 1,79 -	479.440.228,00	5,00 1,79 -	4.212.640.110,00	5,00 1,79 439,00 1,04 1,16 -	4.086.934.145,00	20,00 7,17 439,00 4,16 4,62 -	9.110.888.283,00	60,00 35,24 2.133,00 83,33 81,50 48,88	21.166.311.244,00	60,00 75,96 38,53 90,09 88,70 100,00				
104		3.27.07.2.01.0001.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	75,00	6.129.101.260,00	30,00	1.286.398.614,00	15,00	999.600.000,00	3,75	6.000.000,00	3,75	81.566.340,00	3,75	131.282.810,00	3,75	567.783.185,00	15,00	786.632.335,00	45,00	2.073.030.949,00	60,00	33,82			
105		3.27.07.2.01.0002.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	5.536,00	3.580.726.090,00	1.694,00	561.409.581,00	1.110,00	220.000.000,00	-	3.047.000,00	-	28.611.000,00	-	6.445.250,00	439,00	118.969.470,00	439,00	157.072.720,00	2.133,00	718.482.301,00	38,53	20,07			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan	Target Rencana Strategis Dinas Pertanian pada Tahun 2026 (Akhir Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Kerja sampai dengan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Dinas Pertanian yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Strategis Dinas Pertanian s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Strategis Dinas Pertanian s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV				13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
107		3.27.07.2.01.0005.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	97,00	5.732.983.514,00	30,00	3.076.355.366,00	38,00	9.295.508.784,00	9,50	322.626.800,00	9,50	369.262.888,00	9,50	4.074.912.050,00	9,50	3.400.181.490,00	38,00	8.167.163.228,00	68,00	11.243.538.594,00	70,10	196,12	
108		3.27.07.2.01.0008.	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang dibentuk (Unit)	3,00	121.153.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program																							74,66	13,78	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja					: Ketersediaan peralatan, perlengkapan, SDM dan biaya operasional kantor dalam menjalankan tugas.																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja					: Banyaknya program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memiliki anggaran dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga menghambat pencapaian kinerja yang telah disusun.																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya					: Percepatan pelaksanaan kegiatan agar target kinerja tercapai.																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya					: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan/Program Tahun Berjalan, sehingga penetapan target kinerja selaras antara RPJMD, Renstra dan RKPD.																				

